



Andhi Nur Rahmadi¹
 Vadhea Nuraliza²
 Alisyia Putri Melani³
 Yunita Agustin⁴
 Faradilla La Seda⁵
 Nurlaili Izzatur
 Rohmah⁶
 Uswatul Hasanah⁷

RELASI BUDAYA POLITIK MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS PANCA MARGA DALAM MENYIKAPI ISU POLITIK PEMILU 2024

Abstrak

Indonesia akan memasuki pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Salah satu kekhawatiran yang muncul menjelang pemilu adalah isu politik identitas. Berkaca dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan Pemilu 2024 karena berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang dibawanya. Salah satu partai politik baru, yaitu Partai Ummat, bahkan sudah terang-terangan akan mengusung politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Isu-isu seperti ini mencederai implementasi demokrasi di negara kita karena bisa menghasilkan perbedaan politik yang tajam dan berujung pada kekerasan. Politik identitas adalah ancaman yang harus diwaspadai menjelang kontestasi politik tahun depan. Masyarakat harus memiliki budaya politik partisipatif yang didukung dengan tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Pemerintah harus memastikan aksesibilitas pemilu bagi semua warga negara, terutama untuk orang dengan disabilitas atau yang tinggal di daerah terpencil, serta memastikan transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum.

Kata kunci: Relasi Budaya Politik, Isu Politik Pemilu 2024

Abstract

Indonesia will enter elections which will be held simultaneously in 2024. One of the concerns that emerged before the election was the issue of identity politics. Reflecting on the experience of the 2017 DKI Jakarta Regional Election, identity politics could be a threat to the implementation of the 2024 General Election because it has the potential to divide political preferences in society on the basis of the ethnic, religious, racial and inter-group issues it brings up. One of the new political parties, namely the Ummat Party, has even openly promoted identity politics in facing the 2024 elections. Issues like this harm the implementation of democracy in our country because they can produce sharp political differences and lead to violence. Identity politics is a threat that must be watched out for ahead of next year's political contestation. Society must have a participatory political culture supported by a fairly high level of political awareness. The government must ensure election accessibility for all citizens, especially for people with disabilities or who live in remote areas, as well as ensure transparency and openness in the general election process.

Keywords: Political Cultural Relations, Political Issues For The 2024 Election

PENDAHULUAN

Budaya politik mencakup keyakinan, sikap, dan tindakan terkait kebijakan pemerintah serta tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Budaya politik yang kuat sangat penting bagi keberhasilan Pilpres 2024 karena akan membentuk perilaku individu dalam masyarakat, administrasi publik, dan pemerintahan. Agar demokrasi partai bisa berkembang di Indonesia pada tahun 2024, penting bagi para pemimpin untuk memiliki kompetensi politik dan

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Panca Marga

email : ardh309@gmail.com, vadheanrlzz@gmail.com, alisyiamelani@gmail.com, yunita1608agustin@gmail.com, faradhillahseda@gmail.com, izzahrohmah123@gmail.com, uswatun1485@gmail.com

menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Penekanan pemahaman dalam demokrasi Indonesia tercermin pada implementasi kedaulatan secara langsung melalui pemilihan umum. Pada akhirnya, tujuannya adalah menciptakan hubungan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dinamika budaya, termasuk pola perilaku sosial dan politik, memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan politik menjadi lebih baik.

Di tengah peristiwa yang terjadi saat ini, politik sering kali lebih diutamakan daripada nilai-nilai kemanusiaan. Namun, penting untuk menyadari bahwa interaksi manusia dalam semua aspek kehidupan pada akhirnya bermanfaat bagi umat manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan bersama. Penting bagi setiap warga negara untuk memahami bahwa kebudayaan merupakan perwujudan hakikat seluruh bangsa Indonesia, dan politik merupakan sarana untuk mengangkat bangsa Indonesia ke posisi yang paling penting melalui persatuan nasional. Korelasi antara budaya politik dan demokratisasi sangatlah penting, karena budaya politik sangat mempengaruhi kemajuan demokrasi. Tanpa pengembangan budaya politik yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, demokratisasi tidak akan berhasil.

Di Indonesia, kebudayaan sering mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Perubahan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal masyarakat Indonesia. Ketika menanggapi perlunya perubahan, individu mungkin mengambil sikap mendukung atau menentang. Proses demokratisasi juga menemui reaksi-reaksi yang bertentangan dari budaya politik masyarakat, baik yang mendukung maupun menghambat proses demokratisasi. Budaya politik yang matang tercermin dari orientasi dan pandangan individu terhadap sistem politik, yang pada akhirnya mendukung sistem politik demokratis. Fenomena demokrasi ini tidak hanya terlihat dalam interaksi individu dengan sistem politik, namun juga dalam interaksi antar kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat. Pada hakikatnya, budaya politik diamati dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, serta antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat.

Budaya politik dapat mempengaruhi perbedaan antara budaya politik dan perilaku politik. Namun kehadiran perilaku politik tidak selalu bertumpu pada budaya politik. Sistem budaya politik di Indonesia tidak berkembang setelah masa Orde Baru atau masa reformasi karena tidak adanya proses transisi demokrasi. Akibatnya, pembentukan budaya politik demokratis yang kuat menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun demokrasi yang berfungsi saat ini.

Maraknya konflik dalam pemilu dapat disebabkan oleh permasalahan dalam budaya politik, seperti mentalitas yang hanya siap untuk menang dan tidak kalah. Hal ini terlihat jelas ketika kandidat yang kalah dan pendukungnya menolak mengakui kemenangan lawannya, sehingga berujung pada protes massal dan kekerasan meskipun terdapat jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut bermula dari kurangnya nilai-nilai demokrasi dalam budaya politik.

Pada tahun 2024, Indonesia akan memperingati demokrasi dan berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai politik yang baik. Pemimpin yang terpilih pada pemilu dan pilkada 2024 harus merupakan individu yang berkompeten, dengan peran partai politik yang berbeda dalam pembangunan politik. Fokus membangun budaya politik demokratis di Indonesia adalah pada peningkatan etika, budaya, dan mengedepankan pemahaman. Penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik lokal, menyelesaikan konflik secara damai dan adil melalui lembaga perwakilan. Hal ini akan membantu menjaga persatuan dan rasa hormat dalam ranah politik. Partai politik dan organisasi lain harus memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi dalam pemilu. Keberagaman dianut dalam demokrasi Indonesia, dengan mengutamakan pluralisme, toleransi, dan integrasi nasional. Politik identitas menjadi kekhawatiran besar menjelang pemilu 2024 karena dapat memperparah konflik politik. Penguatan politik identitas menimbulkan ancaman terhadap persatuan nasional dan keberagaman masyarakat, sehingga berpotensi berdampak pada proses demokrasi.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya politik terhadap perilaku politik individu menjelang pemilu 2024, sekaligus mengumpulkan data mengenai peran politik identitas pada pemilu yang sama. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk

mendapatkan wawasan tentang pengalaman partisipan dalam lingkungan alami dengan menggunakan teknik ilmiah. Informasi dikumpulkan dari sumber sekunder seperti buku, e-book, jurnal, dan artikel online untuk dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang politik identitas untuk meningkatkan pemahaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana keterlibatan politik dan mencerminkan pelaksanaan kedaulatan sipil. Selama pemilu, warga negara mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik melalui pemungutan suara, sehingga menjadikan mereka kekuatan paling berpengaruh di suatu daerah. Partisipasi merupakan aspek mendasar dalam demokrasi, karena didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan terbaik untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya (Husni, 2021). Dengan menerapkan praktik demokrasi, kita dapat mengamati perkembangan budaya politik di masyarakat dan perilaku politik terkait yang ditunjukkan masyarakat. Nilai-nilai, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, memberikan kerangka bagi aspirasi dan tujuan masyarakat. Di Distrik Percut Sei Tuan, nilai-nilai tersebut membentuk perilaku politik dan dapat dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang wilayah tersebut. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya merupakan norma-norma kemasyarakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Sistem demokrasi mendorong partisipasi politik masyarakat dan menumbuhkan berbagai perilaku politik. Sepanjang proses politik, individu dan kelompok masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik. Dalam pemilu yang demokratis, perilaku masyarakat dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan mereka, termasuk apakah mereka mempertimbangkan dengan cermat kelayakan seorang kandidat atau memilih dengan santai. Pemilihan umum mempunyai arti penting bagi demokrasi di Indonesia. Namun, cara masyarakat mendekati pemilu dipengaruhi oleh budaya politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya politik mempengaruhi perilaku politik masyarakat jelang pemilu 2024. Partai politik juga berperan penting dalam membentuk perilaku politik, terutama melalui upaya penjangkauan dan advokasi politik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, terutama melalui pendidikan politik dan upaya advokasi yang efektif.

Definisi dan Konsep Budaya

Menurut Almond dan Verba (1963), budaya politik diartikan sebagai sikap warga negara terhadap sistem politik dan komponennya, serta pandangannya terhadap peran warga negara dalam sistem tersebut. Pemahaman budaya politik ini memadukan orientasi sistem dan orientasi individu. Sikap warga negara terhadap sistem politik dan peran mereka di dalamnya merupakan aspek penting dari budaya politik. Sistem politik harus mengutamakan kesejahteraan warga negara, sehingga mengarah pada tindakan konstruktif dalam sistem tersebut. Masyarakat dengan budaya politik yang kuat akan menunjukkan ciri-ciri seperti pemilu yang damai, minim konflik politik, dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, budaya politik yang positif dapat meningkatkan proses pembangunan yang diawasi oleh pejabat terpilih.

Ancaman Politik Identitas

Pada pemilu 2019, terjadi kebangkitan kembali politik identitas anti kemapanan, khususnya terkait identitas agama, yang dieksploitasi oleh politisi populis untuk menunjukkan bahwa pemerintah melakukan diskriminasi terhadap komunitas Muslim. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan seperti kampanye “Ganti Presiden 2019” dan narasi “Partai Setan vs Partai Allah”, serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga mapan dan independen. Terus digunakannya bentuk-bentuk politik identitas yang mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan persatuan berpotensi semakin mempolarisasi masyarakat bahkan elite politik itu sendiri. (Ardipandanto, 2020: 44).

Konflik SARA akan terjadi jika politik identitas terjadi secara berlebihan, sehingga memiliki implikasi pada kualitas demokrasi Indonesia, utamanya pelaksanaan pemilu. Pertarungan politik, entah itu pemilu ataupun pilkada, jika bernuansa politik identitas juga akan mengarah pada populisme dengan sentimen agama. Konfrontasi antara dua kekuatan ekstrem politik identitas seolah meniadakan ruang moderasi dan jalan tengah yang mengedepankan

rasionalitas dan kematangan berpikir. Memilih salah satu pihak adalah kewajiban dan bersikap seolah pihak yang satunya pasti salah. Kondisi demikian tidak memberikan sisa bagi ruang dialog dalam ranah dinamika demokrasi, malah yang ada adalah saling benci, saling curiga, dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat (Wicaksono, dkk, 2021: 121-122).

Menurut penulis, politik identitas digunakan hanya untuk mendulang suara dalam sebuah kontestasi pemilihan umum. Masalahnya, ideologi partai politik seringkali dimanipulasi, bahkan sampai dieksploitasi oleh partai untuk kepentingan kelompoknya saja, bukan masyarakat, apalagi negara. Ditambah fakta bahwa ideologi partai tidak memiliki akar kuat bagi masyarakat Indonesia membuat mereka tidak punya pilihan atau preferensi pasti dalam menggunakan hak pilihnya. Partai politik jadinya menggunakan simbol-simbol identitas berbasis agama atau etnis untuk mendulang suara, selain juga praktek-praktek kecurangan, seperti politik uang. Belum lagi penggunaan media sosial untuk diseminasi isu-isu identitas. Kesadaran politik masyarakat yang rendah dalam menggunakan sosial media sudah pasti berdampak negatif. Narasi politik identitas akan bertebaran di dunia maya, tanpa filter, sehingga berpotensi mengancam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti.

Terdapat potensi konflik relasional antara agama dan negara dalam konteks politik identitas di Indonesia. Para elit politik menyukai politik identitas yang berbau agama sebagai cara tepat untuk meraup suara dalam pemilu karena agama punya efek elektoral tinggi terhadap keikutsertaan politik. Memang dalam ranah demokrasi, politik identitas tidaklah haram atau dilarang aturan, namun jika dieksploitasi pasti akan memiliki pengaruh yang buruk, khususnya di negara multikultural, multietnis, dan multiagama seperti Indonesia (Wicaksono, dkk, 2021: 122).

Mengambil contoh Partai Ummat, menurut pendapat penulis, deklarasi partai tersebut yang terang-terangan mengusung politik identitas memang tidak melanggar aturan apa-apa. Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 politik identitas berubah menjadi terminologi negatif, apalagi setelah muncul labelisasi dan stigmatisasi agama tertentu. Secara terbuka di publik para politisi menolak hadirnya politik identitas karena dapat membunuh nilai-nilai demokrasi. Presiden Jokowi bahkan sering mengingatkan publik untuk tidak terpengaruh oleh politik identitas. Sebagai negara mayoritas pemilih Muslim, akan sangat mudah memainkan isu identitas untuk mendapatkan simpati publik. Tentu partai politik akan berebut ceruk pangsa pasar suara pemilih seperti itu, sekalipun memainkannya tidak secara terang-terangan, kecuali Partai Ummat tadi.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, partai politik yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di Indonesia. Hasto menilai di Indonesia yang majemuk dan bersatu, partai politik yang mengusung politik identitas tidak akan diterima. Hasto menyatakan, partai harus berpegang teguh pada prinsip dan ideologi bangsa dan Pancasila sesuai undang-undang partai politik. Partai Ummat sepertinya kurang paham dengan konsep tersebut sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi Pancasila jika tetap mengusung tema tersebut. Hasto yakin masyarakat bisa menilai sendiri tindakan Partai Ummat. Jika muncul partai yang mengusung politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa, maka rakyatlah yang akan menjadi hakim utama. (Liputan6, 2023).

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang keduanya merupakan lembaga penyelenggara pemilu, juga merespons tema politik identitas yang diusung Partai Ummat. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, mengusung tema politik identitas dalam pemilu merupakan pelanggaran aturan. Jika partai atau kandidat menggunakan politik identitas sebagai sarana sosialisasi atau kampanye pada pemilu, maka hal tersebut dianggap melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini melarang penggunaan instrumen SARA dalam kampanye. Menurut Ketua KPU, konsep politik identitas bisa disebut sebagai instrumen SARA jika kita memaknainya berdasarkan bahasa hukum. (Pojoksatu, 2023).

Kedua, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan menegur karena Partai Ummat karena mengusung politik identitas, sekalipun ia tidak menjelaskan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Bawaslu setelah teguran diberikan. Bawaslu punya kepentingan agar para peserta pemilu tidak menggunakan politisasi identitas. Untuk itu, Ketua Bawaslu mengimbau agar politik identitas tidak lagi digunakan. Indonesia punya banyak agama, makanya tidak etis untuk saling meniadakan satu sama lain. Republik ini dibentuk atas lima agama dan keyakinan yang diakui undang-undang dasar. Apabila partai saling meniadakan identitas yang lain, bisa

jadi masalah besar. Jangan ada identitas agama di ruang publik dan iklim demokrasi. Toleransi harus dikedepankan dalam ruang publik dan iklim demokrasi. Bagja menambahkan bahwa partai politik harus semakin bijaksana untuk tidak menggunakan politik identitas, serta kedepankan sikap saling menghormati. Umat islam dikenal sebagai umat yang toleran dan juga demokratis (Tribunnews, 2023).

Pendapat pengamat politik Ahmad Khoirul Umam terkait Partai Ummat, adalah bahwa dukungan mereka terhadap Anies akan memberi penguatan bagi basis massa loyalis Anies sendiri. Sekalipun demikian, bisa jadi dukungan tersebut menjadi beban politik bagi Anies mengingat citra mantan Gubernur Jakarta tersebut. Apabila Partai Ummat mempertebal narasi politik identitas Anies, maka di beberapa kesempatan yang terjadi justru Anies menyangkal memainkan permainan identitas dalam politiknya, seperti kejadian Pilkada DKI lalu. Katakanlah basis massa Anies masih terus mencoba menjual narasi politik identitas seperti itu, malahan bisa berbalik jadi amunisi tajam bagi lawan-lawan politik Anies. Dengan demikian, bukan konsolidasi kekuatan basis swing voters dan undecided voters untuk Anies, narasi tersebut malah akan mendegradasi legitimasi politik Anies dan partai-partai pendukungnya juga (Kompas, 2023).

Salah satu bahaya politik identitas adalah terjadinya pembelahan, baik di masyarakat maupun juga di kalangan partai sendiri, seperti contoh di atas. Apakah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sepakat dengan Partai Ummat untuk sama-sama mengusung politik identitas dalam mengampanyekan Anies? Jika pun setuju, apakah isu ini tidak akan membawa pembelahan politik di masyarakat, bahkan juga diantara basis massa partai-partai tersebut?

Menurut penulis, politik identitas akan melahirkan pembelahan sosial dan politik di masyarakat, yang biasanya disebabkan masalah SARA tadi. Politik identitas pasti selanjutnya akan disertai dengan berbagai kejadian, seperti ujaran kebencian (hate speech), diseminasi berita bohong (hoax), penyebaran ancaman dan permusuhan dengan kelompok tertentu, hingga bisa jadi sampai pada penyerangan fisik. Sebuah fakta yang mengganggu interaksi sosial masyarakat dan harmonisasi kita dalam berkenegaraan.

Mengamati dinamika politik jelang pemilu 2024 dan nama-nama yang selalu teratas dalam berbagai survei sebagai calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, penulis berpendapat pembelahan karena politik identitas akan kembali terjadi pada pemilu tahun depan tersebut. Penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong, serta permusuhan terhadap kelompok tertentu yang mengarah pada tindak kekerasan secara sangat vulgar akan mewarnai kontestasi politik menjelang Pemilu 2024. Masyarakat Indonesia akan kembali terkotak-kotakan, masing-masing berdasarkan afiliasi politik mereka. Dalam demokrasi, preferensi politik tidak diharamkan, namun pilihan berdasarkan SARA tentu bukan contoh kehidupan berdemokrasi yang baik.

Menurut Muhtadi (2019:10), fenomena politik identitas yang dihadirkan dalam populisme Islam, jika berada di tangan para pemimpin dan politisi yang tidak mau menentang status quo, dapat menjadi kekuatan beracun yang lambat laun mengikis demokrasi. Hal tersebut bukan lagi "madunya" demokrasi, melainkan ilusi berbahaya bagi mereka yang gagal memahami sesungguhnya ancaman dan bahaya politik identitas terhadap keberlangsungan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Penting untuk menyadari bahwa kehadiran politik identitas adalah hal yang biasa dalam setiap peristiwa politik, dan individu terpelajar memahami dinamika ini. Namun, masyarakat marginal dan individu berpendidikan rendah seringkali terlibat dalam protes, kerusuhan, dan aksi tanpa memahami sepenuhnya esensi dari gerakan tersebut, sehingga dapat menimbulkan disharmoni atau kekacauan dalam masyarakat (Wasi, 2022). Memang benar, politik identitas merupakan wacana kontemporer dalam praktik politik nasional dan global. Tidak jarang politik identitas muncul seiring dengan perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan kepercayaan. Namun politik identitas seringkali menimbulkan konflik dan kekerasan di masyarakat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hal ini lebih berbahaya daripada politik uang karena potensi konsekuensinya dalam jangka panjang. Masyarakat menjadi terfragmentasi, perbedaan menjadi semakin nyata, dan intoleransi serta ketidakharmonisan dapat terjadi kapan saja. Konflik disfungsi dan laten juga berpotensi terjadi sehingga membuat masyarakat menjadi ketakutan.

Itu sebabnya mengapa menuju Pemilu 2024, penulis menilai bahwa politik identitas tetap akan digunakan oleh para peserta pemilu. Politik identitas sangat efektif untuk untuk melakukan

mobilisasi dukungan publik bagi kandidat, serta adalah strategi yang sangat murah dan mudah dilakukan. Memang jika literasi politik masyarakat kuat, mereka akan merasa lelah dibenturkan secara politik, sehingga narasi politik identitas berubah menjadi strategi ahistoris yang tidak lagi relevan bagi mereka. Namun pertanyaannya, apakah literasi politik masyarakat kita sudah kuat? Hal ini yang masih menjadi tanda tanya besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Panca Marga Probolinggo khususnya program studi FISIP yang telah memberikan tugas untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemilu 2024.

SIMPULAN

Mayoritas masyarakat memiliki budaya politik partisipatif yang diperkuat oleh tingkat kesadaran politik yang relatif tinggi. Faktor-faktor seperti pendidikan, media, keluarga, dan agama berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Partai politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku politik dengan memberikan informasi dan mengadvokasi tujuan-tujuan tertentu. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan strategi advokasi yang efektif. Menjelang pemilu tahun 2024, kebangkitan politik identitas diperkirakan akan mempengaruhi lanskap politik di Indonesia selama lima tahun ke depan. Permasalahan terkait suku, agama, dan ras kemungkinan besar akan semakin mengemuka pada tahun 2023, meski belum meluas. Isu-isu ini diperkirakan akan kembali berperan penting pada pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. *Jurnal Politica*. Vol. 11, No. 1. 43-63. [10.22212/jp.v11i1.1582](https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582)
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT. *Kajian moral dan kewarganegaraan*, 9(2), 374-388
- Liputan6.com. (19 Februari 2023). Sindir Partai Ummat, Sekjen PDIP Hasto Sebut Pakai Politik Identitas Tak Akan Menang di Indonesia. <https://www.liputan6.com/news/read/5211469/sindir-partai-ummatsekjen-pdip-hasto-sebut-pakai-politik-identitas-tak-akan-menang-diindonesia>
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Elektoral*. Malang: Intrans Publishing.
- Wasi, I. (25 Desember 2022). Politik Identitas di Pemilu 2024. <https://harian.fajar.co.id/2022/12/25/politik-identitas-di-pemilu-2024/>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhanas RI*. Vol. 9, No. 4. 117-124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>